

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian tentang analisis kritis pelibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi, serta tanggapan masyarakat terhadap *stakeholders* dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi?

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal. Kesimpulan pertama adalah bahwa keterlibatan *stakeholders* dalam formulasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika masih dikatakan belum baik karena ada beberapa *stakeholder* yang masih belum berperan atau terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika ini. Kesimpulan ini didukung dengan beberapa bukti sebagai berikut:

1. Diskominfoarfus: Diskominfoarfus tidak ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika karena berdasarkan wawancara, pejabat di Diskominfoarfus yaitu Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Layanan TIK masih baru dan Diskominfoarfus merupakan dinas yang baru terbentuk sehingga tidak ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, hanya terlibat dalam pelaksanaan melalui support IT melalui website seperti sosialisasi dan promosi dalam kegiatan BIAF.
2. Kejaksaan Negeri Cimahi: Kejaksaan Negeri Cimahi belum terlibat secara spesifik dalam perumusan peraturan secara khusus mengenai animasi, namun dalam RPJMD Kota Cimahi 2012-2017 sudah terlibat dalam hal pengawasan.
3. Warga Negara Individu (Masyarakat Kota Cimahi): Masyarakat Kota Cimahi belum terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika karena tidak pernah dilibatkan atau tidak pernah diajak berdiskusi oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika.
4. BPMPTSP: BPMPTSP terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi melalui FGD yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan dalam hal pembentukan Renstra Dinas, Renja dan juga

penentuan anggaran atau penetapan anggaran belanja yang berkaitan dengan pengembangan animasi dan telematika.

5. Setda bagian ekonomi: Setda bagian ekonomi terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika melalui aspirasi yang diberikan pada saat pembuatan kebijakan sehingga memunculkan kebijakan tersebut.
6. Disdagkoperin: Disdagkoperin ikut terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi dalam forum (FGD) yang diselenggarakan Bappeda.
7. DPRD: DPRD terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika melalui pemberian masukan dan saran di dalam pembahasan penyusunan rancangan awal RPJMD Kota Cimahi.
8. Bappeda: Bappeda terlibat dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika karena peran Bappeda memang di perencanaan melalui perencanaan dengan merencanakan bagaimana supaya sektor animasi bisa berkembang dalam periode 5 tahun melalui penyusunan RPJMD Kota Cimahi 2012-2017 dan juga sebagai koordinator di dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika.
9. CCA: CCA terlibat di dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi dalam bentuk menyalurkan aspirasi dalam FGD yang diselenggarakan oleh Bappeda.

Demikian juga dengan keterlibatan *stakeholder* dalam implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi masih belum baik karena masih terdapat beberapa *stakeholder* yang masih belum dengan baik dalam menjalankan perannya. Kesimpulan ini didukung dengan beberapa bukti sebagai berikut:

1. BPMPTSP: BPMPTSP masih belum baik menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi dan telematika dari sisi promosi karena sebagian besar dari responden (masyarakat Kota Cimahi) tidak mengetahui bahwa BPMPTSP telah melakukan promosi mengenai event yang berkaitan dengan pengembangan animasi dan telematika dan lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan responden yang masih belum mengetahui adanya Festival BIAF yang diselenggarakan sejak tahun 2012 hingga tahun 2017.
2. Disdagkoperin: Walaupun melalui hasil wawancara Disdagkoperin terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, Disdagkoperin masih belum baik menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dari sisi pelaksanaan program karena sebagian besar responden (masyarakat Kota Cimahi) merasa masih belum merasakan manfaat dari pelaksanaan program Disdagkoperin yaitu program inkubasi bisnis berbasis animasi dan film.
3. Diskominfoarfus: Walaupun melalui hasil wawancara Diskominfoarfus terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan

telematika, namun Diskominfoarfus masih belum baik menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dari sisi mensupport IT melalui sosialisasi di website dan promosi Festival BIAF di website masih buruk karena sebagian besar responden menyatakan bahwa dinas – dinas terkait tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai kegiatan pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dan juga lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan responden masih belum mengetahui adanya Festival BIAF di Cimahi yang diselenggarakan sejak tahun 2012 hingga 2017.

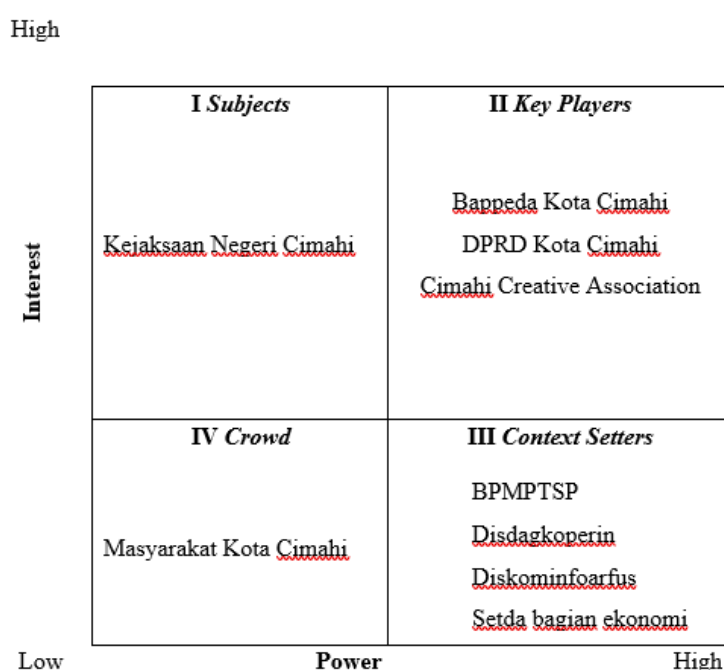
4. CCA: Walaupun melalui hasil wawancara CCA menyatakan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika, namun pada kenyataannya CCA masih belum baik menjalankan perannya dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika melalui pelaksanaan pelatihan pembuatan animasi masih buruk karena lebih dari setengah dari jumlah keseluruhan responden tidak mengetahui dan menerima manfaat dari pelatihan pembuatan animasi yang diselenggarakan oleh CCA tersebut padahal tujuannya untuk pengembangan SDM di Kota Cimahi.
5. UPT *Technopark*: UPT *Technopark* terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi karena memang UPT *Technopark* sebagai penyedia sekaligus pengelola sarana dan

prasarana yang memfasilitasi kegiatan untuk pengembangan animasi film karena untuk program yang dilaksanakan oleh Disdagkoperin dan CCA.

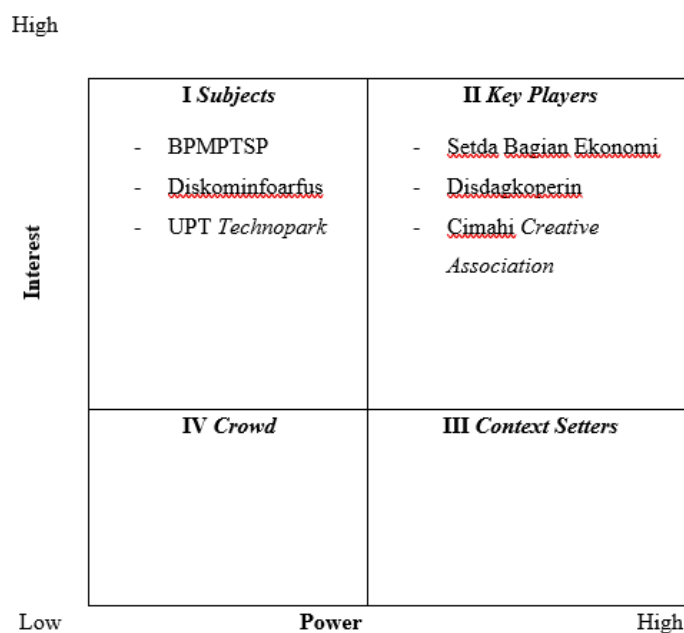
6. Setda Bagian Ekonomi: Setda bagian ekonomi terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi karena Setda Bagian Ekonomi sebagai koordinator yang mensinkronisasikan kegiatan-kegiatan yang ada pada dinas teknis.

Berdasarkan hasil identifikasi peran dari masing-masing *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi, maka masing-masing *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam empat (4) kuadran, seperti berikut ini:

Pengelompokan *Stakeholder* dalam Formulasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika



Pengelompokan *Stakeholder* dalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Animasi Film dan Telematika



Sehingga berdasarkan temuan-temuan yang ada di lapangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi belum berhasil apabila dilihat melalui keterlibatan *stakeholder* dalam formulasi dan implementasi kebijakan karena berdasarkan hasil temuan-temuan di lapangan, keterlibatan *stakeholder* baik dalam formulasi maupun implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika ini dikategorikan masih belum baik karena beberapa alasan yang telah disebutkan diatas.

6.2 Saran

Berikut ini akan dijelaskan mengenai saran yang dapat diusulkan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian ini:

- Berdasarkan temuan hasil wawancara, masih terdapat beberapa *stakeholder* yang belum terlibat dengan baik dalam perumusan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi seperti masyarakat, dan Diskominfoarfus. Peneliti mengusulkan seharusnya Pemerintah Kota Cimahi melibatkan masyarakat Kota Cimahi secara keseluruhan dalam kebijakan pengembangan animasi film dan telematika dengan cara diajak berdiskusi secara rutin oleh Pemkot Cimahi, bisa dilakukan melalui media sosial yang dimiliki oleh Kota Cimahi atau melalui PESDUK yang dimiliki oleh Kota Cimahi yang menjadi media bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan masukan-masukan/ aspirasi mereka.
- Berdasarkan hasil survei, peran dari hampir secara keseluruhan SKPD/*stakeholder* dalam implementasi kebijakan pengembangan animasi film dan telematika masih belum berjalan dengan baik. Peneliti mengusulkan sebaiknya dilakukan:
 - Pembinaan terhadap masing-masing SKPD yang menjadi *stakeholder* dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika agar dapat menjalankan peran yang tidak hanya berorientasi pada outputnya saja tetapi berorientasi pada dampak dari kebijakan ini.
 - Promosi terkait BIAF yang dilakukan oleh BPMPTSP dan Diskominfoarfus harus dimaksimalkan karena masih banyak masyarakat Kota Cimahi yang belum mengetahui bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah melaksanakan festival animasi yang dinamakan BIAF sejak tahun

2012 hingga 2017. Promosi tersebut dimaksimalkan dengan cara yaitu BPMPTSP mendatangi dan melakukan workshop di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan animasi di Kota Cimahi. Tidak cukup hanya itu saja, BPMPTSP juga sebaiknya melakukan promosi pelaksanaan pameran BIAF melalui spanduk atau baliho di area-area yang ada di Kota Cimahi, bisa juga dengan menyebarkan pamflet atau brosur-brosur kepada masyarakat Cimahi. Kemudian, support IT melalui promosi lewat website yang dilaksanakan oleh Diskominfoarfus juga harus dimaksimalkan dengan cara membuat promosi semenarik mungkin lewat website dan juga media sosial agar masyarakat Kota Cimahi tertarik untuk mengunjungi festival BIAF tersebut.

- Pemerintah Kota Cimahi membentuk bidang/ divisi *Monitoring* dan *Evaluasi (Monev)* untuk mengevaluasi terkait pelaksanaan kebijakan pengembangan animasi film dan telematika Kota Cimahi.

6.3 Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan untuk melakukan pengkajian ulang terhadap kebijakan pengembangan animasi film dan telematika di Kota Cimahi yang telah berjalan selama 5 tahun dengan melakukan revisi/ perbaikan sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh peneliti diatas, karena berdasarkan hasil survei menggunakan kuesioner kepada 214 orang responden bahwa lebih dari setengah jumlah keseluruhan responden yaitu sebanyak 57,3 persen mengatakan Kota Cimahi cocok untuk dikembangkan menjadi Kota Animasi dan Film. Mereka merasa dengan penetapan Kota Cimahi sebagai Kota

Animasi/Film memberikan manfaat bagi warganya yang dibuktikan dengan hasil survei menggunakan kuesioner kepada 214 orang responden bahwa sebanyak 49,8 persen merasa menerima manfaat dengan ditetapkannya Kota Cimahi sebagai Kota Animasi/Film.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anderson, James A. 1969. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston dikutip dari B. Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*. Yogyakarta: CAPS
- Avraham, Eli dan Ketter, Eran. 2008. *Media Strategies for Marketing Places in Crisis Improving the Image of Cities, Countries and Tourist Destinations*. UK: Elsevier
- Dunn, William. 1999. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
- Heryani, Ani. 2010. *Paradigma Kebijakan Publik*. Bandung: Unpad Press
- Hogwood dan Gun. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. USA: Oxford University Press dalam Purwanto, Erwan A dan Sulistyastusi, Dyah R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Howlett, M dan Ramesh, M. 2003. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Canada: Oxford
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta, Gava Media
- Lester, James P dan Stewart, Joseph. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Australia: Wadsworth dikutip dari Winarno, Budi. 2016.

Kebijakan Publik Era Globalisasi: Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif. Yogyakarta: CAPS

Moleong, L. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group

Purwanto, Erwan A dan Sulistyastusi, Dyah R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2014

KARYA ILMIAH

Branco, M. Castelo dan Rodriguez, L. *Positioning Stakeholder Theory within the Debate on Corporate Social Responsibility (CSR)*. EJBO (Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies), Vol. 12, No.1, 2007

Klijn, E.H, Eshuis, J, dan Braun, Erik. *The Influence of Stakeholder Involvement on The Effectiveness of Place Branding*. Public Management Review, Vol. 14, No. 4, 2012

- Murfianti. *Membangun City Branding Melalui Solo Batik Carnival*. Jurnal Penelitian Seni dan Budaya, Vol. 2, No.1, 2010
- Ooi, C dan Pedersen, J. 2010. *City Branding and Film Festivals: Re-evaluating Stakeholder's Relations' Place Branding and Public Diplomacy* Vol. 6, 2010
- Purwianti, L dan Lukito, Y. *Analisis Pengaruh City Branding Kota Batam Terhadap Brand Attitude (Studi Kasus pada Stakeholder di Kota Batam)*. Jurnal Manajemen, Vol. 14, 2014.
- Ramdhani, A dan Ramdhani, M. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. Jurnal Publik, Vol. 11, No 1, 2017
- Reed, dkk. *Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource management*. Journal of Environmental Management, Vol 90, 2009
- Riege, A dan Lindsay, N. *Knowledge management in the public sector: stakeholder partnerships in the public policy development*. Journal of Knowledge Management, Vol. 10, 2006
- Taufiqurokhan. 2014. *Kebijakan Publik (Pendelegasian TanggungJawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan)*: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (pers)
- World Health Organization. 2005. *Health Service Planning and Policy Making: A toolking for Nursen and Midwives*. (Module 2 Stakeholder Analysis and Networks)

DOKUMEN PEMERINTAH

Dokumen Profil Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cimahi Tahun 2016

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 –
2017

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Perindustrian
(Disdagkoperin) Kota Cimahi Tahun 2012-2017

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi 2012-
2017

SUMBER INTERNET

Cakrawalamedia, *Kota Cimahi Kembali Gelar Baros International Animation
Festival 2017* melalui, <https://www.cakrawalamedia.co.id/kota-cimahi-kembali-gelar-baros-internasional-animation-festival-2017/> Diakses pada
tanggal 06 Oktober 2017 pukul 14.20 WIB

Kusumaningtyas, A. *City Branding dan Kebijakan Publik: Studi Kasus di
Kabupaten Purwakarta* melalui,
http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=108871&is_local=1 Diakses
pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 10.53 WIB

Morris, J dan Baddache, F. *Back to Basics: How to Make Stakeholder
Engagement Meaningful for Your Company* melalui,
https://www.bsr.org/reports/BSR_Five-

Step_Guide_to_Stakeholder_Engagement.pdf Diakses pada tanggal 12
Oktober 2017 pukul 17.04 WIB

Website Pemerintah Kota Cimahi melalui,
<http://www.cimahikota.go.id/skpd/detail/75> Diakses pada tanggal 15
Desember 2017 pada pukul 12.05 WIB.